

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Citra Rizki dan Suryo Pratolo, 2013. Analisis terhadap Dugaan Pemanfaatan Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Bantuan Keuangan oleh Incumbent dalam Pemilukada serta Efektivitasnya terhadap Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Akuntansi & Investasi*. Vol. 14 No. 1, halaman: 1-13, Januari 2013
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. 2018. Analisis APBD Tahun 2018. <http://www.perpustakaan.bappenas.go.id/lontar>. 2018. Data Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2018 <http://www.djpk.depkeu.go.id>
- Direktorat Jenderal Otonomi Daerah. 2015. Data status kepala daerah Kabupaten/Kota serta daftar kepala daerah seluruh Indonesia. <http://www.otda.kemendagri.go.id>
- Ghozali, Imam, 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS, Edisi 7, *Badan Penerbit Universitas Diponegoro*, Semarang.
- Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). 2018. *Data Akhir Masa Jabatan Kepala Daerah Tahun 2015*. Diunduh tanggal 16 April 2018, http://www.otda.kemendagri.go.id/images/file/data_dan_informasi/seputar_otda/daftar_kdh_wkdh_31032015.pdf.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. *Cegah Penyalahgunaan Hibah Bansos*, <http://kpk.go.id/id/berita/siaran-pers/1657-cegah-dana-bansos-dan-hibah-dari-penyalahgunaan>
- Komisi Pemilihan Umum. 2018. Rekapitulasi Perolehan Suara Nasional Pileg 2014. <http://www.kpu.go.id> . 2018. Data jadwal pemilukada kabupaten/kota tahun 2018.
- Kuncoro, Mudrajad. 2009. *Metode Riset untuk Bisnis & Ekonomi, Edisi Ketiga*, **Penerbit Erlangga**, Jakarta
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

- Prabowo, Erry Dwi, 2016. Pengaruh Faktor Politik dan Karakteristik Pemerintah Daerah terhadap Alokasi Belanja Hibah Pada Pemerintah Kota/Kabupaten di Indonesia TA 2015. *Jurnal Akuntansi dan Bisni*. Vol. 16 No. 2, halaman: 97-107, Agustus 2016
- Pramitha, Puput Risky. 2015. Analisis Rasio untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen 2009 – 2013. *Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta*
- Republik Indonesia. 2012. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Ritonga, I. T. dan M. I. Alam. 2010. *Apakah Incumbent Memanfaatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk Mencalonkan Kembali dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)*. Paper dipresentasikan pada acara Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XIII, Purwokerto.
- Rochmatullah, M. R. 2014. *Determinan Pengalokasian Belanja Bantuan Sosial pada Pemerintah Daerah Tk II di Indonesia*. Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Sjahrir, B. S., K. Kis-Katos, and G. G. Schulze. 2013. Political Budget Cycles in Indonesia at the District Level. *Economic Letters*, 120 (2), 342-345.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Methods)*. Bandung : Alfabet
- Suranta, Sri dan Ristian Pangarso, 2015. Penganggaran Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Hibah Sebelum dan Pada saat Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015. *Universitas Sebelas Maret*
- Winoto, Agus Hadi dan Falikhatun. 2015. Indikasi Penyalahgunaan Discretionary Fund dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Menjelang Pemilukada 2015. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia*. Volume 12 Nomor 1, Juni 2015.

